



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 817/V/2014

IV/MEI 2014



DPR Usulkan Tutup STIP Bila Kasus Kekerasan Terulang

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MEI 2014

Minggu Ketiga bulan Mei 2014 Masa Sidang IV 2013-2014, DPR mengagendakan Rapat Paripurna membahas tiga agenda, yaitu Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015, Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2013 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut ringkasannya:

Sebelum dimulai Rapat Paripurna, disampaikan bahwa ada 2 surat masuk dari Presiden RI, pertama surat tertanggal 12 Mei perihal permohonan pertimbangan bagi pencalonan Duta Besar LBBP Republik Cyprus, dan kedua, surat tertanggal 19 Mei perihal penyampaian RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014. Ketua Rapat juga menginformasikan adanya surat masuk dari 33 anggota DPR tertanggal 12 Mei perihal permintaan Hak Angket, juga surat dari Pimpinan Fraksi Demokrat (FPD) tertanggal 19 Mei tentang penarikan 12 anggota FPD, mencabut dukungan terhadap penggunaan hak angket tentang Pemilu Legislatif 2014. Sehubungan dengan penarikan dukungan 12 anggota FPD tersebut, sesuai ketentuan pasal 166 ayat (1) Tata Tertib DPR-RI, maka pengusulan mengenai permintaan hak angket belum memenuhi persyaratan.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



tahun 2015 yang bertema: “Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Dalam menyusun dokumen KEM dan PPKF 2015, Pemerintah telah mempertimbangkan perkembangan perekonomian terkini, prospek perekonomian di tahun 2014 dan 2015, perkembangan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan, serta berbagai tantangan yang ada. Pertimbangan-pertimbangan ini melandasi perumusan kebijakan yang tepat dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan. Secara umum, Pemerintah mengatakan bahwa perekonomian domestik diperkirakan melambat dari 5,8% pada tahun 2013 menjadi 5,5% pada tahun 2014. Perlambatan tersebut terutama karena menurunnya kinerja ekspor terkait melemahnya permintaan dari mitra dagang utama

Selanjutnya, memasuki agenda pertama. Untuk memenuhi pasal 152 ayat (1) peraturan Tata Tertib DPR-RI, Pemerintah menyampaikan Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015 meliputi: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran berikutnya, Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam penyusunan usulan dan anggaran, dan rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2015 merupakan penjabaran arah dan strategi yang akan ditempuh Pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan isu-isu strategis, serta mendukung pencapaian sasaran dan target pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

di kawasan Asia, melambatnya kredit bagi dunia usaha dan tingginya tingkat suku bunga sebagai dampak upaya menjaga stabilitas ekonomi, masih lemahnya harga komoditi internasional serta dampak jangka pendek kebijakan dilarangnya ekspor bahan tambang mentah.

Kondisi perekonomian global dan domestik diperkirakan akan membaik tahun 2015. Gambaran tersebut didasarkan pada berbagai proyeksi yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan institusi internasional, seperti IMF, World Bank, dan OECD. Perkiraan yang sama juga dikeluarkan oleh lembaga-lembaga di pasar keuangan global. Kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi di berbagai negara semakin memberikan hasil yang lebih nyata bagi pemulihan ekonomi global. Perkembangan yang sama juga diperkirakan terjadi pada perekonomian Indonesia. Pandangan-pandangan



tersebut memberikan dampak positif bagi Indonesia, berupa perspektif dan intensif bagi para investor domestik dan global, terhadap peluang usaha dan investasi Indonesia.

Atas dasar perkembangan perekonomian global dan kinerja perekonomian domestik 2013, serta *out-look* 2014 dan 2015, maka Pemerintah telah menyusun sejumlah Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2015 yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), serta *lifting* minyak dan gas bumi.

Laju pertumbuhan ekonomi 2015 diperkirakan akan lebih baik dari 2014 yang berada pada kisaran 5,5% – 6,0%. Selain dukungan faktor eksternal, lebih baiknya pertumbuhan ekonomi didorong oleh membaiknya stabilitas dan fundamental ekonomi serta berlanjutnya kebijakan struktural untuk mengatasi masalah kendala penawaran (*supply constraint*) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan berimbang.

Laju inflasi tahun 2015 diperkirakan berada pada kisaran $4\% \pm 1\%$. Upaya menjaga inflasi akan didukung dengan upaya menjamin pasokan kebutuhan masyarakat, dukungan perbaikan distribusi barang kebutuhan ke pelosok nusantara serta optimalisasi instrumen-instrumen moneter dan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas harga.

Pergerakan nilai rupiah terhadap dollar AS tahun 2015 masih akan dipengaruhi oleh bauran beberapa faktor yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Membaiknya koordinasi upaya pemulihan ekonomi di tingkat global seperti G20 di berbagai forum regional, lebih memberikan transparansi kepastian arah kepada pasar keuangan global. Dengan demikian, gejala fluktuasi arus modal internasional yang pada gilirannya akan mempengaruhi gejala nilai tukar, dapat diminimalisir. Bank Indonesia dan OJK memperkirakan nilai tukar rupiah 2015 akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp. 11.500 - Rp. 12.000 per dollar AS.

Suku bunga SPN 3 bulan yang dijadikan landasan untuk penghitungan pembayaran bunga utang Pemerintah tahun 2015 diperkirakan berada pada rentang 6,0 - 6,5% atau sedikit lebih tinggi dari perkiraan 2014. Perkiraan rentang suku bunga didasarkan pada faktor-faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Semakin membaiknya pendapatan masyarakat serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang instrumen investasi disertai upaya pemerintah untuk mendorong penguatan dan pengembangan instrumen pasar, akan menjadi faktor yang mendorong penurunan tingkat suku bunga obligasi pemerintah termasuk SPN 3 bulan.

Rata-rata minyak ICP diperkirakan pada kisaran 95-110 dollar AS per barel. *Lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 2.100-2.170 ribu barel setara minyak perhari yang terdiri dari *lifting* minyak bumi sebesar 900-920 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.200-1.250 ribu barel setara minyak per hari. Dinamika indikator ekonomi makro tersebut menunjukkan bahwa peluang pengembangan ekonomi nasional 2015 semakin luas, namun juga disertai tantangan dan resiko yang makin kompleks. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mengakselerasi pencapaian target

pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan umum yang efektif dan efisien serta mendukung program-program pembangunan sesuai RKP 2015. Upaya peningkatan kualitas belanja negara ditempuh melalui optimalisasi alokasi belanja yang produktif, kebijakan bantuan dan subsidi yang efisien, penerimaan bantuan dan subsidi yang tepat sasaran, mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta penguatan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Upaya pengendalian resiko dan menjaga kesinambungan fiskal ditempuh antara lain melalui: *pertama*, mengendalikan defisit dalam batas aman, *kedua*, mengendalikan rasio utang terhadap PDB, dan *ketiga*, mengendalikan resiko fiskal dalam batas aman. Kebijakan defisit tahun 2015 akan ditempuh, masih akan bersifat ekspansif namun terukur.

Agenda *kedua* Rapat Paripurna adalah *Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2013 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan* oleh Ketua BPK-RI. Pada semester II tahun 2013, BPK memeriksa 662 obyek pemeriksaan dan BPK mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp. 13,96 triliun. Dari jumlah kasus tersebut, 3452 kasus senilai Rp. 9,24 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain, penyerahan aset dan/atau penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan dengan penyerahan aset/penyeteroran ke kas negara/daerah senilai Rp. 173,55 miliar.

Pada semester II tahun 2013, BPK juga melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 108 Pemerintah Daerah dan memberikan opini WTP atas 7 LKPD, opini WDP atas 52 LKPD, opini Tidak Wajar (*adverse*) atas 2 LKPD, dan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) atas 47 LKPD. Pemeriksaan keuangan juga dilakukan terhadap 9 badan lainnya di Pusat, dan BPK memberikan opini WTP atas dua laporan keuangan, WDP atas satu laporan keuangan, dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) atas 6 laporan keuangan.

BPK juga telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 158 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan atas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) TA 2011- semester I TA 2013, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan obat yang merupakan tugas pokok dan fungsi BPOM belum dilaksanakan secara efisien dan efektif. Antara lain proses registrasi obat yang memakan waktu cukup lama sehingga berpengaruh terhadap harga obat. Pemeriksaan atas Kinerja atas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional 2012 dan 2013, BPK menemukan bahwa pengawasan atas pelanggaran batas muatan kendaraan yang melintas pada ruas jalan nasional jalur Pantura di Provinsi Jabar, Jateng, dan Jatim kurang terkoordinasi dan tidak efektif,

sehingga mengakibatkan kerusakan jalan. Pemeriksaan kinerja atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di Provinsi Kalimantan Tengah, BPK menemukan kelemahan-kelemahan. Antara lain belum dimilikinya data dan informasi terkait pencegahan hutan dan lahan, data cuaca sebagai *input* Sistem Peringatan Dini (*early warning system*) belum dimanfaatkan secara memadai.

Agenda ketiga Rapat Paripurna yaitu Pengesahan Pem-

entukan Pansus RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diinformasikan bahwa sekretariat jenderal telah menerima nama-nama calon panitia khusus RUU ini, yang selanjutnya disahkan menjadi anggota Pansus RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pansus tersebut telah terbentuk dan dapat memulai kegiatannya.**

DPR Usulkan Tutup STIP Bila Kasus Kekerasan Terulang



Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama berdialog dengan Siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda.

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama mengatakan, tujuan kunjungan kerja ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Marunda, dalam rangka untuk mengetahui aktivitas operasional kegiatan Sekolah tersebut pasca musibah meninggalnya taruna di Sekolah tersebut akibat tindakan kekerasan seniornya.

Pasalnya, lanjut Laurens, secara operasional STIP berada dibawah Kementerian Perhubungan, tentunya Komisi V DPR bertanggung jawab dari sisi pengawasan dan anggarannya. Sementara dari sisi teknis akademis berada dibawah Kementerian Pendidikan.

“Kita ingin sistem pendidikan kita tetap memegang disiplin namun tanpa kekerasan,” ujarnya saat diwawancarai

Parlemen, sesuai kunjungan ke STIP Marunda, Senin, (19/5).

Menurutnya, konsep senior dan junior harus diputus dengan dibarengi oleh konsep kekeluargaan artinya jangan sampai senior selalu benar. “Mata rantai harus diperbaiki, misal sistem pendidikan dari sisi etika. DPR memiliki kewenangan sisi operasional kita bisa merekomendasi kepada Mendikbud untuk ditutup jika terulang kembali,”ujarnya.

Dia mengharapkan, STIP dapat menghasilkan tenaga operasional dengan tidak menerapkan budaya kekerasan. “Kita akan mengundang pihak Kementerian Perhubungan maupun Kemendikbud membahas persoalan ini nanti,”ujarnya.

Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan Santoso Eddy Wibowo mengatakan, pihaknya benar-benar terpukul dan duka mendalam karena munculnya kejadian penganiayaan Taruna STIP yang dipukul oleh kakak senior hingga yang bersangkutan meninggal dunia. “Kejadian tersebut merupakan hari berkabung Badan Pengembangan SDM Kemenhub selama 5 hari,” katanya.

Menurutnya, Badan Pengembangan SDM Kemenhub telah dipanggil ombudsman untuk menjelaskan rinci terkait proses pelayanan publik yang diberikan alur proses pembelajaran di STIP

Dia menambahkan, terdapat 32 langkah perbaikan dan penyempurnaan metode dan pola pengasuhan taruna. Di antaranya melakukan review skema rekrutmen instruktur

pengasuh taruna dan penempatannya.

Berikutnya, menghilangkan doktrin-doktrin anti kekerasan melalui pembentukan *agent of change* antara lain menunjuk petugas *anti violence observer* serta kampanye, penyuluhan dan seminar anti kekerasan. “Kemudian merumuskan anti kekerasan verbal, selain itu penyebaran muatan 49 karakter *softskill* ke dalam mata kuliah wajib (agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan Pancasila),” tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, akan ditingkatkan kegiatan ceramah agama, training motivasi, *outbond* dan ceramah umum. “Kita juga akan melengkapi *softskill* pada konsep pedoman pembentukan *competency* dan penyempurnaan pedoman pola asuh taruna,” ujarnya. (Sugeng Irianto), foto : andri/parle/hr.

Dharma Wanita Persatuan Kelompok III Jalin Silaturahmi

Selain untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Instansi Pemerintah Pusat, acara yang digelar DWP Kelompok III ini juga sebagai ajang *sharing* atau berbagi informasi dan pengalaman seputar cara mengelola keluarga, termasuk di dalamnya cara mengelola keuangan keluarga.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen DPR RI, Titik Djuned di sela-sela acara Silaturahmi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Instansi Pemerintah Pusat Kelompok III di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (21/5).



Ketua DWP Setjen DPR RI, Titik Djuned berpose bersama para Ketua DWP di Kelompok III.

“Dharma Wanita Persatuan (DWP) Instansi Pemerintah Pusat ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Kebetulan DWP Setjen DPR tergabung dalam Kelompok III dengan 10 DWP lainnya. Acara ini digelar oleh DWP Kelompok III tujuannya tidak lain untuk mengeratkan tali silaturahmi di antara sesama anggota DWP. Selain itu juga sebagai ajang pembelajaran dan *sharing* pengalaman seputar keluarga, termasuk cara mengelola keuangan keluarga,” ungkap Titik Djuned.

Ditambahkannya, keluarga memiliki

peran penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan handal. Bahkan keluarga juga memiliki peran dalam membentuk karakter bangsa yang mandiri. Oleh karena itulah diperlukan sebuah langkah yang bijak bagi wanita dalam hal ini DWP sebagai penggerak perubahan untuk mengelola keluarga termasuk didalamnya mengelola keuangan keluarga, demi tercapainya ketahanan ekonomi keluarga.

Dalam acara ini hadir Pakar Marketing, Renald Kasali yang mengajarkan

bagaimana menciptakan ketahanan ekonomi keluarga. Selain itu, acara yang juga dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Pusat, Nila Moeloek ini juga digelar serangkaian acara lainnya, seperti pameran dan bazaar produk-produk unggulan dari UKM (usaha kecil menengah) dari masing-masing DWP, peragaan busana oleh para anggota DWP itu sendiri, serta permainan alat musik tradisional angklung dan kulintang oleh DWP Pekerjaan Umum, serta paduan suara gabungan anggota Dharma Wanita Persatuan. (Ayu) foto: rizka/parle/hr.

RUU AP Jamin Kepastian Hukum Pemerintah dan Publik

Menteri PAN&RB Azwar Abubakar mengatakan RUU Administrasi Pemerintahan (AP) memuat beberapa gagasan penting untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya untuk menjamin kepastian hukum atas perilaku pejabat publik, institusi pemerintah dan publik.

Gagasan pertama, hubungan antar instansi pemerintah, kedua, pemanfaatan teknologi, ketiga, kejelasan tanggung jawab, keempat, prosedur administrasi pemerintahan, kelima, keputusan administrasi pemerintahan, dan keenam, upaya administrasi terhadap keputusan administrasi pemerintahan.

“RUU tentang Administrasi Pemerintahan ini akan menjadi dasar bagi kodifikasi istilah hukum administrasi dan keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan,” kata Azwar saat Raker dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Selasa (20/5).

Menurutnya, hal ini bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari praktek mal administrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh institusi atau pejabat pemerintahan dalam usahanya memperoleh haknya.

Sejalan dengan hal tersebut, jelas Azwar, RUU ini akan menjadi dasar hukum materiil bagi setiap pejabat dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

“Hukum materiil tersebut untuk me-



MenPAN-RB Azwar Abubakar dan jajaran saat Raker dengan Komisi II DPR.

lengkapi hukum formil sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.5 tahun 1986, sebagaimana diubah dalam UU No.9 tahun 2004 dan UU 51 tahun 2003). UU ini akan menjadi dasar bagi para pejabat administrasi dalam membuat keputusan dan tindakan, serta hakim dalam memutus gugatan di PTUN,” jelasnya.

Pada sisi lain, tambahnya, UU ini juga memberikan proses pembelajaran kepada individu dan masyarakat untuk memperoleh haknya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan, Azwar menerangkan, RUU ini berlaku untuk institusi dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-

fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta institusi atau pejabat pemerintahan lainnya.

“Dengan demikian RUU ini akan menjadi salah satu media untuk memberikan kepastian hukum atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah,” tandasnya.

Menurut Azwar, pembahasan RUU ini telah dilakukan antar pemerintah sejak tahun 2004. Pembahasan cukup panjang dikarenakan luasnya spektrum kegiatan administrasi pemerintahan untuk menghasilkan sebuah RUU yang komprehensif dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. (nt) foto: rizka/parle/hr.

DPR Akan Bahas RUU Administrasi Pemerintahan

Komisi II DPR bersama pemerintah bersepakat akan membahas RUU Administrasi Pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, reformis dan modern dengan segenap administrasinya yang bisa diandalkan.

“RUU ini tidak hanya mampu memberikan penguatan

atas kinerja pemerintah dan pejabat pemerintah, tetapi juga melindungi kepentingan rakyat terutama menyangkut kemungkinan terjadinya mal administrasi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo saat Raker dengan Menpan dan RB Azwar Abubakar di Jakarta, Selasa (20/5).

la menambahkan, poin penting dalam RUU ini adalah demi menata administrasi kita menjadi lebih baik, karena ini menyangkut bagaimana cara mengambil keputusan dan kewenangan, “Disini juga bisa dilihat apakah pejabat-pejabat pemerintah jika diperlukan dengan kewenangan diskresinya dapat mengambil kebijakan dalam hal keputusan,” tegasnya.

“Sekarang banyak gara-gara urusan administrasi yang sesungguhnya tidak terkait dengan substansi kemudian menjadi salah, kemudian orang takut. Lalu pejabat tidak berani bertindak, misalnya ada yang tidak kompatibel antara satu instansi dengan instansi lainnya, dan akhirnya kinerja menjadi lamban. Akibatnya kemampuan bekerja pemerintah dalam melayani publik menjadi tidak optimum, dan lagi-lagi yang dirugikan tidak saja mereka yang terkait langsung dengan kerja pemerintahan tetapi juga masyarakat luas,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari F-PDIP ini dengan adanya UU ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi terbangunnya sistem administrasi pemerintahan yang modern, prima, yang sanggup mendorong atau menjadi penguat bagi berlangsungnya

reformasi birokrasi pemerintahan di negeri ini.

Selanjutnya, terang Arif, setelah rapat ini, setiap fraksi akan menyampaikan DIM dan kemudian bersama-sama akan dikompilasi dan langsung dibahas bersama pemerintahan, “RUU ini adalah inisiatif pemerintah, artinya RUUnya sekaligus naskah akademiknya disiapkan pemerintah,” jelasnya.

la menambahkan, target penyelesaian RUU ini paling lambat adalah akhir periode jabatan selesai, “Jadi September paling lambat harus sudah selesai, Insya Allah sebelum reses nanti sudah bisa kita selesaikan meskipun tidak tuntas. Mungkin 60 sampai 70 persen materinya sudah bisa kita rampungkan, setelah reses kita masuki persidangan berikutnya bisa kita selesaikan, selanjutnya kita Paripurnakan atau definitif pertengahan September,” terangnya.

Di tempat yang sama, Menpan dan RB Azwar Abubakar mengatakan RUU ini diharapkan akan menjadi pemicu perubahan, “RUU ini bertujuan akan mampu menerapkan prinsip *good governance*, mengurangi kolusi, korupsi dan nepotisme, menciptakan standar



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

hukum administrasi pemerintahan, melindungi individu dari tindakan kesewenang-wenang dan mal administrasi dalam administrasi pemerintahan, menjadikan azas-azas hukum dan norma hukum yang mengikat.

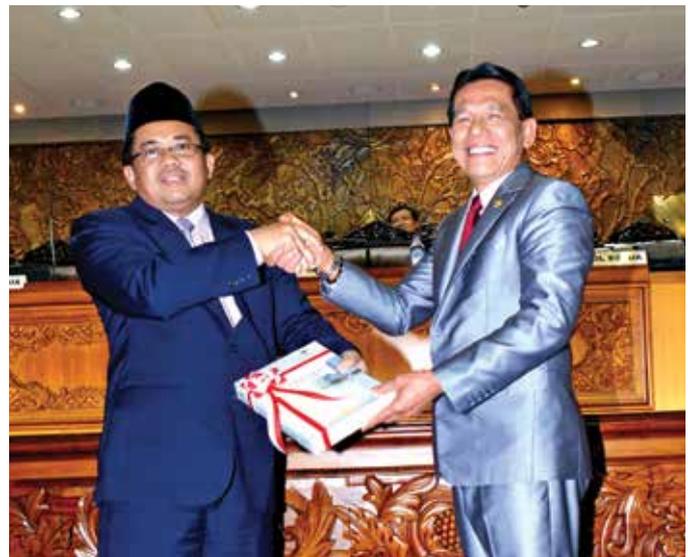
RUU Administrasi Pemerintahan merupakan usul inisiatif dari pemerintah, 10 tahun pemerintah menggodoknya, dan baru beberapa waktu yang lalu diserahkan ke DPR dan sudah ada keterangan dari pemerintah mengenai RUU ini. (nt), foto : rizka/parle/hr.

BPK Ungkap Lebih Dari 10 Ribu Kasus Senilai Rp 13,96 triliun

Pada semester II Tahun 2013, Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa 662 objek pemeriksaan, yang terdiri dari 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 13,96 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK Rizal Djalil pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013, saat Sidang Paripurna, Selasa (20/05). Penyerahan hasil pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester.

“Dari 10.996 kasus tersebut, sebanyak 3.452 kasus senilai Rp 9,24 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan,” jelas Rizal.



Ketua BPK Rizal Djalil menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013 kepada Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain dengan penyerahan aset atau penyeteroran, baik ke kas negara, daerah, ataupun perusahaan milik negara atau daerah. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan dengan penyerahan aset atau penyeteroran kas senilai Rp 173,5 miliar.

Periksa 108 Pemerintah Daerah

Pada kurun waktu yang sama, BPK juga melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) pada 108 Pemerintah Daerah dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada 7 LKPD, 52 LKPD mendapat opini WDP. Sedangkan, 2 LKPD mendapat opini Tidak Wajar (adverse), dan sisanya, atau sebanyak 47 LKPD disematkan opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*).

“Pemeriksaan keuangan juga dilakukan terhadap 9 badan lainnya di tingkat pusat. BPK memberikan opini WTP atas 2 laporan keuangan, WDP atas 1 laporan keuangan, dan tidak memberikan pendapat kepada 6 laporan

keuangan,” tambah Rizal.

Dari hasil laporan Ketua BPK ini, DPR akan menyerahkan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), untuk dipelajari dan dianalisis.

“Setelah dari BAKN, kemudian diserahkan kepada Komisi-komisi, sehingga hasil analisis ini dapat dijadikan Komisi sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah,” tanggap Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. (*sf*), [naefurodjie/parle/hr](#).

DPR Apresiasi Laporan Semester II Tahun 2013 oleh BPK

Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman menyatakan apresiasinya terhadap laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013 yang disampaikan oleh Ketua BPK Rizal Djali. Terutama terkait dengan pemeriksaan kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Saya secara pribadi mengapresiasi laporan BPK, terutama temuan terkait dengan obat. Mudah-mudahan di Komisi IX DPR RI dapat ditindaklanjuti, karena kita sedang memasuki tahun pertama BPJS, dimana sebagian dana itu untuk obat. Akibat fungsi BPOM yang belum maksimal, menyebabkan harga obat menjadi mahal,” jelas Sohibul saat Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (20/05).

Sebelumnya, Rizal menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan kinerja BPOM tahun anggaran 2011 sampai semester 1 2013 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan obat, dimana hal itu merupakan tugas pokok dan fungsi BPOM belum dilaksanakan secara efisien dan efektif.

“Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan secara efisien dan efektif itu antara lain proses registrasi obat yang memakan waktu cukup lama, sehingga akhirnya berpengaruh terhadap harga obat,” jelas Rizal.

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini, diadakan seminar di Insti-



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

tut Teknologi Bandung pada 15 April lalu, yang dihadiri oleh kalangan akademisi dan praktisi bidang farmasi dari seluruh Indonesia.

“Diharapkan, hasil seminar tersebut

dapat ditindaklanjuti dengan upaya kongkrit dalam rangka menurunkan harga obat, atau merasionalkan harga obat yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia,” imbuh Rizal. (*sf*), [foto : naefurodjie/parle/hr](#).



Wakil Bicara



Ketua DPR RI Marzuki Alie

“Penyelenggara pemilu yang tidak amanah melaksanakan tanggung jawabnya berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kalau merasa honorinya kecil sehingga menghalalkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual suara, sebaiknya tidak usah menjadi petugas TPS, PPS, maupun PPK, daripada mengkhianati rakyat dan merusak nilai-nilai demokrasi.”

“Timwas Century DPR perlu lacak aset-aset Bank Century di luar negeri seperti di Hongkong dan Swiss. Bagi Timwas wajib hukumnya untuk mengkonfirmasi kembali apa yang dilaporkan Tim Asset Recovery yang diketuai Menkumham, sekaligus memperkuat laporan Timwas yang akan berakhir tugasnya bersamaan berakhirnya keanggotaan DPR akhir September 2014.”



Anggota Timwas Century Ahmad Yani



Wakil Ketua Badan Legislasi Sunardi Ayub

“Terkait Revisi UU Kepolisian, disepakati Polri tetap dibawah Presiden, tapi harus mandiri atau dengan menggunakan tambahan kata ‘merdeka’, ini yang masih jadi perdebatan. Karena Polri tidak boleh terlibat dalam politik, termasuk politik Presiden.”

Timwas Century Desak Aparat Segera Tangkap Tersangka Yang Lari ke LN

Timwas Century DPR meminta kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan proses penegakan hukum termasuk menangkap tersangka dan terpidana yang melarikan diri ke luar negeri. Dengan demikian agar aset Bank Century segera dapat disita dan dikembalikan kepada negara.

Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja Timwas Century DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dengan Kejagung, Kapolri, Menkumham, Wakil dan Kemensesneg dan Kemenkeu, Rabu (21/5) di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Kapolri Jenderal (pol) Sutarmanto dalam penjelasannya mengatakan, polri telah menangani 41 berkas perkara. Sebanyak 31 diantaranya masih dalam proses, sedangkan 4 berkas perkara karena tersangkanya melarikan diri yakni Anton Tantular, Dewi Tantular dan Hendro Wiyanto serta Hartawan Alui, masih ditindaklanjuti oleh polri.

Di bagian lain, Timwas juga meminta kedua penegak hukum itu untuk menanggapi dengan serius gugatan Hesham Al-Waraq dan Rafat Ali Rzvi di Pengadilan Arbitrase, agar negara tidak dirugikan. Timwas juga berharap Tim Asset Recovery segera dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mengembalikan Bank Century baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.

“Timwas berharap Tim Asset Recovery dapat menghadapi tantangan dan



Suasana Rapat Timwas Century dengan Kejagung, Kapolri, Menkumham, Wakil dan Kemensesneg dan Kemenkeu.

mengatasi segala hambatan yang ada untuk mengembalikan aset Bank Century. Termasuk melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang mengklaim aset Bank Century yang telah dibekukan,” ujar Pimpinan Sidang Taufik Kurniawan.

Tim Asset Recovery juga didorong melakukan segala upaya yang diperlukan termasuk meningkatkan kerjasama dengan otoritas terkait di luar negeri guna mengembalikan aset Bank Century. DPR juga meminta Tim Asset Recovery untuk membuat daftar aset Bank Century yang sudah diselamatkan, agar dapat menjadi tolak ukur keberhasilan penanganan dan pengembalian aset Bank Century.

Kesimpulan ini sejalan dengan usulan anggota Timwas Fahri Hamzah perlu disusun daftar aset yang sudah kembali beserta nilainya untuk diumumkan supaya jelas dan menjadi prestasi Timwas DPR. Tak kalah penting, rencana penjualan Bank Mutiara harus dimasukkan dalam daftar penjualan aset dimana Pemerintah mengajukan penawaran sekitar 8 triliun.

“Meskipun kita *muter-muter* hampir lima tahun ini, tapi ada uang balik. Jangan sampai publik itu lihat nggak ada uang balik,” katanya. Menkumham Amir Syamsudin mewakili Pemerintah dalam kesempatan ini menyambut baik kesimpulan tersebut dan usulan memasukkan penjualan Bank Century bisa diakomodir. (mp) foto: eka hindra/parle/hr.

Pansus Tolak Usulan Badan Kajian MPR

Pansus DPR untuk revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menolak usulan Sekretariat Jenderal MPR RI yang menginginkan ada badan kajian ketatanegaraan yang bekerja mengkaji konstitusi sekaligus menjadi *supporting system* bila ada usulan

amandemen. Badan ini juga sekaligus yang menyosialisasikan konstitusi hasil amandemen.

Demikian mengemuka dalam pembahasan Pansus revisi UU MD3 di ruang BAKN DPR, Rabu (21/5). Rapat meng-



Wakil Ketua Pansus RUU MD3 Nurul Arifin.



Wakil Ketua Pansus RUU MD 3 Fahri Hamzah.

lembaga parlemen tersebut.

Usulan MPR untuk membentuk badan kajian mendapat kritik tajam dari Wakil Ketua Pansus Fahri Hamzah (F-PKS). Tugas badan tersebut tidak permanen. Untuk sosialisasi empat pilar yang selama ini digalakkan MPR juga sebaiknya diserahkan ke Kemenkominfo yang diberi kewenangan untuk menyosialisasikan berbagai produk UU. Sosialisasi bukan wilayah kerja legislatif.

Sebaiknya MPR hanya jadi lembaga *ad hoc* saja, karena tidak ada pekerjaannya yang permanen. Fungsi dan tugas MPR sebaiknya dilakukan dalam bentuk *joint session* saja, seperti melantik presiden dan wakilnya, mendengarkan pidato presiden, dan mengamandemen UUD. Selain itu, Sekretariat MPR juga mengusulkan pimpinan MPR terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat para anggotanya. (mh) foto: naefurodjie/parle/hr.

Tiga Sekretariat Parlemen Perlu Dipertahankan

Tiga sekretariat parlemen, baik Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD sebaiknya tetap dipertahankan seperti sekarang. Artinya, tidak ada penggabungan sekretariat bersama. Bahkan, ketiga lembaga ini harus diperkuat.

Demikian usulan yang dikemukakan Anggota Pansus RUU revisi atas UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Soemandjaja (F-PKS) di sela-sela rapat Pansus, Rabu (21/5). Wacana membentuk sekretariat bersama memang sering mengemuka saat pembahasan RUU MD3. Tapi, karena peran dan fungsinya yang berbeda, sekretariat jenderal perlu tetap dipisah.

“Karena peran dan fungsi masing-masing secara ekstrim berbeda, saya pribadi memandang masih perlu dipertahankan seperti ini. Bahkan, perlu ada penguatan,” tandas Soemandjaja. Usulan penggabungan hanya *political will* yang sempat berkembang. Pansus, memang, masih mencari format terbaik atas ketiga lembaga legislatif ini.

Usulan penggabungan sekretariat didasari pada keberadaan tiga lembaga legislatif ini di satu areal. Masing-masing punya sekretariat jenderal hingga klinik kesehatan yang berbeda. Bila digabungkan mungkin akan lebih efisien. Namun, bagi Soemandjaja ketiganya harus tetap terpisah karena tugasnya yang juga berbeda.



Anggota Pansus RUU MD3 Soemandjaja.

Sementara pada bagian lain, Anggota Komisi II DPR ini juga berharap agar masing-masing sekretariat jenderal memberi masukan konstruktif agar lembaga legislatif ini lebih mandiri. Para pegawai yang notabene PNS di tiga sekretariat parlemen ini, juga diharapkan tidak bergantung pada lembaga eksekutif yang mengatur norma kepegawaian. Semuanya harus menyatu dalam konteks membangun independensi parlemen sebagai lembaga. (mh) foto: naefurodjie/parle/hr.

Komisi VIII Apresiasi Peningkatan Pelayanan Haji

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan untuk jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1435 H/2014 M. Namun Wakil Ketua Komisi VIII, Mahrus Munir yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (19/5), berharap agar upaya

yang telah dipaparkan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah tersebut harus konsisten dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai Pihak Penyelenggara Ibadah haji.

“Ada beberapa peningkatan kualitas atau perbaikan yang sudah dirancang

oleh Dirjen PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah), kami sangat mengapresiasi langkah tersebut. Namun hendaknya rencana peningkatan atau perbaikan itu harus konsisten dilakukan. Jadi bukan sekedar rencana tapi tetap dilakukan atau dijalankan dengan konsisten,” ungkap Mahrus.

Peningkatan kualitas yang dimaksud diantaranya meliputi pemondokan di Mekkah yang kualitasnya setingkat bintang tiga. Dalam hal transportasi, Dirjen PHU juga sudah merencanakan langkah antisipatif dengan menambah jumlah bis antar kota dari dan menuju bandara. Bis salawat pun ditambah hingga melayani 75 persen jemaah (dari sebelumnya hanya 50 persen). Bahkan kondisi bis pun akan menjadi perhatian besar pihak Kemenag.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Mahrus Munir.

Sementara dalam bidang catering, Dirjen PHU mengupayakan penambahan menu catering lewat peningkatan anggaran sebesar 1,5 milyar. Anggaran catering di embarkasi naik menjadi 20 ribu. Selain itu Dirjen PHU juga telah menyusun langkah-langkah antisipatif terhadap catering yang nakal dengan peningkatan pengawasan yang disertai *punishment* atau sanksi bagi catering yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. (Ayu), foto ; andri/parle/hr.

Parlemen Remaja Cinta Budaya Bangsa

Banyak pihak mengkhawatirkan generasi muda Indonesia semakin kehilangan identitas ketika terjangkit budaya asing termasuk trend K-Pop semakin membanjiri negeri ini. Kekhawatiran itu nampaknya tidak terbukti ketika menyaksikan 136 siswa peserta kegiatan Parlemen Remaja 2014 unjuk kebolehan.

“Saya terus terang surprise peserta Parlemen Remaja ini pintar menulis, berdiskusi, berdebat ternyata juga piawai membawakan seni budaya daerah masing-masing. Kita khawatir remaja sekarang larut dengan budaya asing, K-Pop, dll,” kata Kabiro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI, Djaka Dwi Winarko saat menyambut kedatangan peserta kegiatan Parlemen Remaja 2014 di Kopo, Jawa Barat, Sabtu (17/5).

Ia menyebut acara Parlemen Remaja kali ini memang beranjak dari kekhawatiran pada budaya asing yang semakin menjerat generasi muda. Itulah sebabnya sengaja dipilih tema “Kenali Budayaamu, Cintailah Negerimu”, bertepatan pula dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei yang akan datang.

“Pesan utamanya kepada generasi



Karo Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko memberikan selamat kepada salah seorang peserta Parlemen Remaja.

muda adalah buka mata betapa bangsa kita sangat kaya dengan ragam budaya daerah yang tentu bagian dari kekayaan budaya bangsa. Warga negara lain mengagumi, kita jangan melupakan,” tegasnya.

Hari pertama pertemuan remaja yang telah diseleksi oleh Tim Universitas Indonesia ini seluruh peserta memperkenalkan ragam budaya masing-masing. Empat peserta dari Sulawesi Tenggara membawakan lagu daerah Witenon Wuno yang berisi pesan mari menjaga kebersamaan.

Sementara dari Kaltim yang diwakili

3 siswa dari SMAN 3 Balikpapan dan 1 siswa dari SMK 2 Balikpapan memperagakan tari energik para prajurit yang berjuang membela ratu. Mereka tampil dengan pakaian khas yang dihiasi bulu burung Enggang.

Perwakilan dari Sulawesi Tengah tidak kalah menarik. Mereka berpidato singkat menggunakan bahasa Kaili Edo salah satu suku dari daerah ini. “Biar teman-teman dari daerah lain tahu. Kita mulai Parlemen Remaja dengan niat yang baik. Belo rakava belo rakovia, niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik,” kata juru bicara Nofandi Surya. (iky), foto : ibnur khaliq/parle/hr.



Parlemen Remaja Diikuti Perwakilan dari 34 Provinsi

Untuk pertama kalinya agenda tahunan Setjen DPR Parlemen Remaja diikuti oleh perwakilan siswa SMA/SMK/MAN dari seluruh provinsi di tanah air. Kegiatan yang diselenggarakan pertama kali untuk tingkat DKI Jakarta ini akhirnya berhasil diperluas karena antusiasme remaja dari daerah cukup besar.

“Tahun ini pertama kali diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Dahulu acara ini hanya diikuti remaja dari DKI saja, terus Jabar saja, Jateng saja. Kegiatan keempat baru DPR memberanikan peserta dari seluruh Indonesia, tapi ada aja halangan untuk lengkap. Nah baru tahun ini bisa diikuti peserta dari 34 provinsi,” kata Ketua Panitia Penyelenggara Parlemen Remaja 2014, Suratna, di Kopo, Jabar, Sabtu (17/5).

Seluruh peserta menurutnya diseleksi ketat dengan persyaratan utama mampu menulis essay terkait permasalahan kebudayaan. Proses seleksi ini melibatkan Tim dari Universitas Indonesia.

Seiring dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, panitia memilih tema; Kenali Budayamu, Cintai Negerimu. Disamping memperkenalkan tentang tugas dan fungsi anggota dewan, para remaja ini juga diajak untuk mengeksplorasi budaya bangsa agar menjadi semakin mencintainya.

“Tema Kenali Budayamu, Cintai



Kabag Humas Setjen DPR RI Suratna.

Negerimu ini berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Sekarang ada kegalauan terhadap budaya kita yang semakin dipengaruhi budaya asing, apabila dibiarkan ini bisa merusak budaya bangsa kalau kita tidak menyadarkan generasi muda kita ini,” ujarnya.

Suratna yang juga Kabag Humas Setjen DPR ini menambahkan dalam kegiatan kali ini pemahaman peserta akan langsung diuji lewat praktek simulasi persidangan membahas RUU Kebudayaan. Untuk menambah wawasan dua pakar diundang sebagai pembicara yaitu budayawan Taufik Ismail dan Prof. DR. Bambang Wibawarta dari Universitas Indonesia.

Sejumlah peserta mengaku mempersiapkan diri secara khusus untuk mengikuti kegiatan ini. Othovino Rensi Hena Ama perwakilan dari

Provinsi NTT menggali ilmu dari anggota DPRD setempat. “Kami dari NTT ada 4 orang siswa, kita banyak baca buku tentang DPR, buka internet termasuk minta masukan dari anggota DPRD Maumere,” ungkapnya.

Sementara peserta dari Papua Lisbeth Megasira Bosawer menyebut secara khusus dibimbing oleh alumni Parlemen Remaja sebelumnya.

Antusiasme Lisbeth dan 133 orang peserta lain semakin meningkat ketika panitia memutar film dan foto pemandangan alam dan budaya Indonesia yang jauh lebih mempesona dibanding negara lain.

Tepuk tangan bergemuruh di Ruang Sidang II Wisma DPR ketika para remaja ini menyaksikan budaya warga Spanyol yang terbirit-birit dikejar sapi. Sementara Indonesia dinilai lebih unggul karena mampu mengendalikan sapi lewat budaya Karapan Sapi di Madura, Makepung di Jembrana, Bali dan Pacu Jawi di Sumbar.

Waktu sudah mendekati tengah malam peserta Parlemen Remaja ini masih bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan yang akan berlangsung tanggal 17-21 Mei nanti. Mereka juga masih bergairah menyambut yel yel yang diserukan Suratna. Parlemen Remaja; Budayaku, Indonesiaku! (iky),
foto : ibnur khalid/perle/hr.

Pansus RUU MD3 : Akan Atur Mekanisme Pemanggilan Paksa

Anggota Pansus RUU MD3 DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan mekanisme ketentuan dalam pemanggilan secara paksa akan diatur dalam Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

“Sebetulnya, didalam UU ini su-

dah ada ketentuan dapat dihadirkan secara paksa, namun mekanisme pemanggilan paksa itu harus sudah jelas, nah yang kemarin-kemarin itu tidak jelas, hanya diatur dalam UU, dan diharapkan nanti dalam Revisi RUU MD3 ini akan kita perjelas bahwa yang menghadirkan paksa adalah Polri,” kata Bambang usai Raker Pansus RUU

MD3 dengan Kapolri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/5).

la menambahkan, tata cara pemanggilan ini penting, karena berkaca saat DPR hendak menghadirkan paksa Boediono itu tidak bisa, “Waktu itu ketika kita ingin menghadirkan paksa Pak Boediono, itu tidak bisa karena



Anggota Pansus RUU MD3 DPR Bambang Soesatyo berdialog dengan Kapolri.

Polri keberatan, alasannya karena tidak diatur didalam UU yang tidak menyebut Polri sebagai pihak yang menghadirkan paksa itu,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap DPR dalam RUU ini, Bambang menjawab bahwa ia ingin semua pihak saling menghormati kewibawaan lembaga tinggi negara.

Ia mencontohkan, ketika ada oknum yang terlibat masalah-masalah hukum, maka harus diatur tata cara penggeledahan, penangkapan dan seterusnya, sehingga tidak merusak kewibawaan lembaga itu.

“Kepada oknum yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti korupsi, ya ambil oknumnya, hukum seberat-beratnya jangan lembaganya yang dirusak,” harap Bambang. (nt), foto : naefurodji/parle/hr.

Parlemen Remaja Ditantang Selesaikan RUU Kebudayaan

Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar kegiatan Parlemen Remaja 2014, agenda tahunan yang bertujuan memberi bekal dan pemahaman tentang kaparlemen kepada generasi muda setingkat SMA/SMK/MA.

Para remaja yang berasal dari 34 provinsi ini belajar tentang tugas dan fungsi DPR, melakukan simulasi rapat dan ditantang menyelesaikan RUU Kebudayaan.

“Disini kalian bisa belajar menghayati bagaimana salah satu pilar negara DPR RI bekerja, nanti kalian juga mendapat tantangan dalam simulasi untuk bisa menyelesaikan RUU Kebudayaan yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi X DPR,” kata Sekjen DPR Winantuningtyastiti saat membuka secara resmi kegiatan Parlemen Remaja 2014, di Kopo, Jabar, Minggu (18/5).

Ia juga secara khusus memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara karena untuk pertama kalinya ajang ini diikuti oleh perwakilan remaja dari seluruh provinsi. Harapannya seluruh peserta yang telah melewati proses seleksi dari Tim Universitas Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti bersama Parlemen Remaja.

“Ini kesempatan emas untuk belajar demokrasi, berdebat dengan santun. Kalian juga bisa belajar memahami bagaimana berbagai kepentingan bisa disatukan termasuk diantaranya kepentingan daerah,” ungkapnya.

Win begitu ia biasa dipanggil menambahkan antusiasme peserta dari sejumlah daerah untuk mengikuti agenda ini cukup besar sehingga patut dipertimbangkan secara berkala dilaksanakan dua kali dalam setahun. Disamping Parlemen Remaja saat ini telah digelar pula *Parlemen Go to Campus* untuk kalangan mahasiswa.

Pada bagian sesi tanya jawab Sek-

jen terperangah menyaksikan acungan tangan hampir seluruh peserta yang berjumlah total 136 orang. Deputi Bidang Perundang-undangan Johnson Rajagukguk yang menjadi moderator harus bekerja keras mengatur jalannya sesi ini.

Pertanyaan yang diajukan peserta juga sangat kritis diantaranya Muthia Nabila Pratiwi perwakilan dari Provinsi Kepri yang mengecam keras maraknya *money politic* dalam pemilu legislatif lalu. Sementara itu Kiki Asdianty siswa SMAN 1 Tidore Kepulauan Maluku Utara mengusulkan lebih baik jumlah anggota dewan dikurangi saja.

“Saya mengusulkan lebih baik jumlah anggota DPR dikurangi saja karena bagi masyarakat itu yang terpenting adalah kualitas kerja bukan banyaknya anggota,” katanya lantang.

Pada bagian akhir sejumlah peserta meminta kesediaan Sekjen untuk menandatangani buku panduan Parlemen Remaja 2014. “Saya kagum sama Sekjen DPR seorang perempuan, ini memotivasi saya siapa tahu nanti bisa jadi Sekjen juga,” ujar Miranti Riska perwakilan Sumsel. (iky), foto : ibnur khaliq/parle/hr.



Kemenag Diminta Segera Sosialisasikan Virus MERS

Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama segera melakukan sosialisasi terkait berkembangnya virus MERS-Co V di Arab Saudi. Hal ini sangat bermanfaat bagi para calon jemaah haji khususnya yang berada di daerah-daerah. Selain itu Komisi VIII juga mendesak Kemenag untuk berkoordinasi dengan Kemenkes RI untuk melakukan antisipasi terhadap wabah virus tersebut.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII, Dalimin dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Senin (19/5) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

“Selama ini para calon jemaah haji hanya mengetahui berita MERS dari pemberitaan media. Tetapi belum ada secara resmi informasi dari Kementerian Agama. Hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu kami berharap agar Kementerian Agama segera menyosialisasikan hal tersebut,” ungkap Dalimin.

Hal senada juga diungkapkan beberapa anggota Komisi VIII lainnya, diantaranya Farida Padmo, M. Baghowi serta Politisi dari Fraksi Gerinda, Sumarjati Aryoso. Sumarjati

mengingatkan agar petugas haji yang bertugas kelak paham betul tentang permasalahan kesehatan termasuk diantaranya pencegahan dan penanganan virus MERS. Tentunya semua itu disesuaikan dengan *travel advice* yang telah dikeluarkan oleh WHO.

Menjawab hal tersebut, Dirjen PHU, Anggito Abimanyu mengatakan bahwa WHO sebagai Organisasi Kesehatan Dunia hanya memberikan *travel advice* atas kasus virus MERS. Diharapkan hal tersebut tidak menimbulkan kepanikan. Namun Kemenag telah mensosialisasikan kepada kantor wilayah-kantor wilayah yang ada di seluruh Indonesia, serta beberapa travel biro haji dan umrah untuk mensosialisasikan kepada para calon jemaahnya tentang virus MERS beserta cara mengantisipasinya.

“Sejauh ini WHO hanya mengeluarkan *travel advice*, kami tidak ingin menimbulkan kepanikan kepada jemaah haji. Kita mengikuti saran Kemenkes, baik itu Kemenkes Arab Saudi maupun Kemenkes Indonesia. Alhamdulillah jemaah Indonesia juga termasuk yang disiplin sehingga belum menimbulkan dampak terhadap jemaah umrah,” jelas Anggito.

Ditambahkannya, selain itu pihak



Anggota Komisi VIII DPR, Dalimin.

Kemenag juga telah menyosialisasikan cara-cara untuk mengantisipasi menu-larnya infeksi virus MERS. Diantaranya tidak memberangkatkan jemaah di bawah usia 12 tahun yang notabene masih sangat rentan terhadap infeksi berbagai virus, selain itu menyarankan jemaah untuk selalu memakai masker selama di tanah suci, tidak berlama-lama dalam kerumunan, selalu cuci tangan dengan sabun.

Selain itu menurut Anggito, di bandara embarkasi juga sudah ada *scanner* suhu tubuh. Sehingga jika ada yang suhu tubuhnya melebihi batas yang ditentukan sudah pasti akan terdeteksi sedari dini. Kementerian Agama juga telah menambah akses bagi jemaah untuk mendapatkan vaksin atau suntikan *meningitis* bagi para jemaah yang akan pergi ke tanah suci. Sehingga saat di tanah suci jemaah sudah memiliki kekebalan tubuh yang cukup. (Ayu), foto : rizka/parle/hr.

Anggota DPR Setuju Pemerksa Anak Dikebiri

Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso menyatakan, setuju untuk dipertimbangkan pegebirian kimia bagi pemerksa dan kejahatan seksual anak. Namun demikian, pemerksa perlu dianalisa jiwa dan otaknya, kalau masih ringan dan bisa kembali normal, sebaiknya dihukum dengan ancaman maksimal 15 tahun.

“Tetapi kalau tingkatnya sudah berat, perilakunya brutal dan setiap kali mau mencabuli anak-anak, saya setuju dikebiri saja,” tegas Sumarjati

menjawab Parlemen menjelang Sidang Paripurna DPR Selasa (20/5).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, sanksi dikebiri bukan berarti alat vitalnya dipotong. Dikebiri artinya diberi zat kimia sehingga hormon testoteronya menurun, sperma tidak diproduksi dan tidak bisa melakukan hubungan seksual. Dengan demikian tidak bisa lagi melakukan pemerksaan.

Kepada anak-anak korban, ia menyarankan supaya para orang tua



Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso.

benar-benar hati-hati menjaga dengan ketat. Jangan sampai anaknya yang masih balita terpapar oleh pertunjukan atau tontonan baik internet atau video yang mempertontonkan porno-

grafi, supaya otaknya tidak keracunan.

Tak kalah penting, jelas Sumarjati, kepada anak-anak perlu diberi pendidikan seksual sejak dini. Jangan dengan mudahnya menganggap tabu, padahal pemahaman seksual itu sangat perlu. Contoh kecil kepedulian, ibu-ibu dalam memandikan anak dilakukan sendiri sehingga kalau ada luka atau memar akan segera diketahui. Selain itu, jangan menganggap di sekolah itu aman, karena itu pihak sekolah diminta ikut menjaga perilaku baik petugas sekolah atau guru.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri mengatakan, hukuman kebiri memang layak dipertimbangkan untuk diberikan pada pelaku kejahatan seksual

anak. Sebab hukuman yang selama ini diberikan tidak sukses memberi efek jera bagi mereka.

“Saya rasa sangat pantas untuk dipertimbangkan. Para pelaku saat di depan televisi seperti sudah insaf, tapi saat ke luar penjara ternyata kembali melakukan tindakan kejinya,” ujar Salim. Ia menyebutkan, hukuman suntik kebiri ini sendiri telah diadopsi beberapa negara di dunia seperti Korsel, Rusia, dan Polandia. Negara tetangga seperti Malaysia pun kini tengah mengkaji hukuman tersebut sejak tahun 2013 lalu.

Kasus-kasus kekerasan seksual anak belakangan merebak, seperti Maret lalu, polisi menangkap sekelompok petugas pembersih bekerja di Jakarta

International School (JIS) karena diduga menyalahgunakan secara seksual murid TK di sekolah itu.

Pada bulan berikutnya (April), badan keamanan Amerika Serikat FBI mengatakan, terdapat seorang tersangka predator yang pernah mengajar di JIS, serta di sejumlah sekolah internasional lainnya di Nikaragua, Inggris, Venezuela dan negara-negara lain. Sang tersangka, William James Vahey, bunuh diri pada bulan Maret.

Selanjutnya pada bulan Mei ini, polisi menahan seorang pria karena diduga melecehkan lebih dari 100 anak laki-laki di bawah umur selama beberapa bulan di Sukabumi, Jawa Barat. (mp) foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR Apresiasi Keputusan MK Tidak Tangani Sengketa Pilkada

Anggota Komisi II DPR Gamari Soetrisno mengapresiasi atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kewenangannya untuk menyidangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah atau sengketa Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pilkada).

“Saya apresiasi keputusan MK itu, jadi nanti sengketa Pilkada biar diselesaikan saja melalui Pengadilan Negeri (PN) atau melalui Mahkamah Agung (MA),” kata Gamari sebelum Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (20/5).

Selanjutnya, tambah Politisi dari F-PKS, UU baru akan segera dipercepat agar kasus-kasus yang terkait dengan sengketa Pilkada segera bisa ditangani oleh lembaga selain MK, “Biar MK fokus menangani masalah yang terkait dengan konstitusi saja,” tegasnya.

Ditempat yang sama, pernyataan senada dikatakan oleh Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain, menurutnya keputusan tersebut merupakan sesuatu yang bagus, “Saya setuju itu, MK selama ini ‘overload’, mendingan MK lebih banyak konsentrasi pada kasus yang lain,” katanya.

Ia melanjutkan, di RUU Pilkada yang sedang dibahas DPR tengah terjadi perbincangan, apakah Pilkada Bupati, Walikota, Gubernur dan Pileg itu semuanya diserahkan ke MK.

“Beredar wacana untuk kita bagi, Pilkada Bupati/Walikota kita serahkan kepada MA, untuk Pilgub kita serahkan ke MK, semangat kita adalah untuk mengurangi beban MK dalam menyelesaikan masalah itu,” terang Malik.



Anggota Komisi II DPR Gamari Soetrisno.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan pengujian Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan MK mengadili sengketa Pemilihan. MK menilai kedua pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Namun, kewenangan sengketa Pilkada masih menjadi kewenangan MK hingga ada Undang-Undang pengganti. (nt), foto : naefurodjie/parle/hr.

Penting, Mengenal Politik Sejak Dini

Mengenal politik sejak dini begitu penting untuk mendidik generasi muda lebih peduli pada bangsa dan negaranya. Para pemuda handal sebagai penyelenggara negara menjadi kebutuhan bangsa Indonesia mendatang.

Inilah yang coba dibangun oleh Sekretariat Jenderal DPR RI melalui program Parlemen Remaja yang diadakan setiap tahun. Bertempat di *Operation Room*, Selasa (20/5), agenda Parlemen Remaja diisi dengan mendengarkan pengenalan dunia politik dari Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. Program ini menghadirkan 136 siswa, baik SMA, SMK, dan MA dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Para peserta Parlemen Remaja menerima pembekalan menarik sekaligus melakukan simulasi di DPR RI.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti dalam sambutannya, mengungkapkan, para siswa yang mengikuti program Parlemen Remaja merupakan siswa pilihan dari 34 provinsi. Mereka harus melewati seleksi dengan menulis esai tentang parlemen. Dan para siswa tersebut juga sudah menjadi pemilih pemula pada pemilu 2014 ini.

Dengan mengambil tema “Kenali Budaya, Cintai Negerimu”, para siswa diarahkan untuk mengenali kekayaan ragam budaya nasional. Apalagi di DPR RI sedang dirumuskan RUU Kebudayaan. “Diharapkan ada *filter* untuk anak-anak dengan mengetahui budaya,” ujar Win dalam sambutannya. Seperti diketahui, program Parlemen Remaja ini sudah memasuki angkatan kedelapan. Antusiasme siswa begitu terlihat.

Mereka tampak gembira dan bersemangat menerima setiap materi seputar parlemen. Mereka juga menyaksikan langsung bagaimana para anggota DPR RI bersidang saat Rapat Paripurna. Sebelumnya, mereka juga sudah menerima banyak pengetahuan tentang politik dan kiprah DPR dari para anggota DPR dan budayawan. Ini tentu kesempatan berharga bagi para peserta.



Peserta Parlemen Remaja menyerahkan Buku Kenangan kepada Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, menyambut gembira perhelatan Parlemen Remaja tersebut. Kepada para peserta, Pramono menyatakan, bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Punya kekayaan budaya, etnis, bahasa, dan agama. Bahkan, punya banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Rakyatnya sangat majemuk dan pluralis.

Bila dibandingkan dengan Mesir yang homogen, mereka tidak bisa mengelolanya sehingga memantik perang saudara. Di Indonesia yang multi-etnis, kehidupannya relatif harmonis. Demokrasi yang telah menampung semua perbedaan tersebut. Di sinilah, ke depan dibutuhkan para pemimpin bangsa yang dapat menjaga kekayaan budaya tersebut.

Apalagi, kata Pramono, para peserta Parlemen Remaja merupakan cermin kebhinekaan. Mereka datang dari beragam etnis, agama, dan bahasa lokal yang berbeda-beda. Bahkan, Indonesia juga dikenal sebagai negara demokratis terkemuka di dunia. “Indonesia adalah negara 10 besar dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan kita bisa menjadi 5 negara besar di dunia,” tandas Pramono.

Tidak hanya itu, Indonesia juga diked-

nal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Di ASEAN, jumlah penduduk Indonesia paling besar. Bahkan, menempati urutan keempat dunia dengan populasi sekitar 250 juta jiwa. Namun, di balik kebesaran itu, ada musuh bersama yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu korupsi.

Korupsi telah merusak mentalitas dan ekonomi bangsa. Ini perlu penanganan serius dari para penyelenggara negara. Para peserta Parlemen Remaja, sambung Pramono, bisa menyaksikan di media massa, betapa berita korupsi hampir setiap hari muncul. “Indeks korupsi kita masih tinggi,” keluh Pramono.

Pada bagian lain, Pramono juga memaparkan bahwa Indonesia punya pantai terpanjang setelah Kanada. Ironisnya, Indonesia masih mengimpor garam. Idealnya, dengan pantai yang panjang itu, kita bisa memproduksi garam sendiri. Tidak hanya itu, di sektor pangan, kita masih bergantung pada impor. Padahal, negeri ini kaya dengan sinar matahari, lahan yang subur, dan SDM yang besar. Hal ini harus menjadi perhatian para peserta Parlemen Remaja yang kelak akan menjadi penyelenggara negara. (mh), foto : andri/parle/hr.

Pemerintah Diminta Intervensi Kebijakan Mutu Pendidikan

Anggota Komisi X DPR Zulfadli mengatakan persoalan banyaknya prosentase ketidaklulusan UN di Prov. NTT dan beberapa wilayah timur lainnya, DPR berharap pemerintah secara serius melakukan intervensi terhadap kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya supaya UN lebih baik di wilayah tersebut.

“Kita sangat menyayangkan, dan memang dari tahun ke tahun UN di NTT selalu mendapat prosentase hasil ketidaklulusan yang tinggi, padahal kita menginginkan dengan UN ini ada intervensi kebijakan daripada Menteri Pendidikan terhadap daerah-daerah yang memang prosentase UN nya rendah,” ujar Zulfadli sebelum Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (20/5)

Ia menyadari, selama ini NTT dan beberapa wilayah daerah Timur, merasa UN ini sangat menjadi beban, karena memang mutu mereka masih jauh dibawah rata-rata daripada mutu di luar daerah timur.



Anggota Komisi X DPR Zulfadli.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, bahwa kita semua pahami bersama bahwa UN tidak merupakan

satu-satunya faktor kelulusan tapi cukup menentukan dengan 60 persen bobot daripada UN itu sendiri, “Tentu ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kelulusan, dan UN tetap diperlukan dalam rangka untuk mendorong supaya mutu pendidikan meningkat,” tegasnya.

Ketika ditanya, solusi bagi siswa yang tidak lulus UN, ia menjelaskan bahwa pemerintah memberikan jalan keluar adanya Paket C, “Jadi bagi yang tidak lulus bisa ikut ujian Paket C, untuk bisa mendapatkan kelulusan, saya pikir itu juga menjadi salah satu solusi,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap, kedepannya pemerintah harus mencari tahu dulu penyebab tingginya ketidaklulusan di NTT, kalau memang ini karena lemahnya sistem proses mengajar di daerah timur, maka harus ada intervensi yang khusus yang dilakukan kepada sekolah-sekolah di daerah timur khususnya di NTT. (nt), foto : naefurodjie/parle/hr.

Pertumbuhan Ekonomi 2015 Akan Lebih Baik Dibanding 2014

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik dari pada tahun 2014, yang berada pada kisaran 5,5-6,0 persen. Lebih baiknya pertumbuhan itu selain dukungan dari faktor eksternal juga didorong oleh membaiknya stabilitas dan fundamental ekonomi. Selain itu, karena berlanjutnya kebijakan struktural untuk mengatasi kendala penawaran.

Demikian dikemukakan Menteri Keuangan M. Chatib Basri saat menyampaikan Pengantar Keterangan Pemerintah atas Kerangka Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2015 di depan Sidang Paripurna DPR, Selasa (20/5).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, Menkeu lebih lanjut mengatakan, upaya-upaya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas dan aksesibilitas terhadap kebutuhan pokok akan terus dilakukan. Sementara, peningkatan kualitas belanja negara melalui efisiensi dan efektivitas belanja operasional, dan upaya per-



Menkeu. M. Chatib Basri.

cepatan penyerapan anggaran diharapkan akan meningkatkan konsumsi pemerintah.

Menurut Chatib Basri, upaya pemerintah dalam rangka mendorong industrialisasi bahan mineral dan tambang diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekspor yang bernilai tambah tinggi. Sedangkan implementasi Masyarakat Ekonomi Asean yang akan dilaksanakan tahun 2015 diharapkan akan meningkatkan peluang pasar yang lebih baik, memperkuat daya saing ekonomi regional termasuk Indonesia, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor.

Tidak berbeda jauh dengan tahun 2014, laju inflasi tahun 2015 diperkirakan pada kisaran 4 persen, nilai tukar rupiah akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp

11.500- 12.000 dolar AS. Harga rata-rata minyak ICP diperkirakan pada kisaran 95-110 dolar per barel, sementara *lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 2.100-2.170 ribu barel setara minyak per hari yang terdiri *lifting* minyak bumi sekitar 900-920 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.200-1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Ditambahkan Menkeu, dinamika indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa peluang pengembangan ekonomi nasional tahun 2015 semakin luas, namun juga disertai tantangan dan resiko yang semakin kompleks. "Karena itu pemerintah tetap berkomitmen untuk terus berupaya mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki," jelas Chatib Basri. (mp), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR Akan Bertindak Tegas Pada Menteri Mangkir

Anggota DPR (F-PPP) Reni Marlinawati menayangkan pembahasan APBN yang disampaikan oleh pemerintah selalu mepet sehingga DPR kesulitan untuk membahas Anggaran secara utuh.

"Setiap melakukan pembahasan anggaran kita memohon supaya jangan mepet sehingga sulit sekali untuk membahas anggaran secara utuh, di mana seharusnya satuan tiganya telah disampaikan kepada DPR," ujarnya di depan Sidang Paripurna DPR, Selasa (20/5).

Disisi lain, terang Reni, menteri juga

kerap mangkir berkali-kali ketika membahas fungsi pengawasan. "Seringkali mangkir bahkan sampai tiga kali dibatalkan dengan alasan tidak bisa kami terima," jelasnya.

Menurutnya, pembatalan ini tidak bisa diterima, karena dapat menyebabkan fungsi pengawasan menjadi lemah. "Sebagai contoh kita masih ada masalah terkait UN, seperti kasus yang menimpa pelajar kita," ujar anggota Komisi Pendidikan ini.

Dia menegaskan, pimpinan harus segera berkiriman surat kepada Presiden untuk menegur menteri terkait. "Kita



Anggota DPR Reni Marlinawati.

minta menteri jika diundang jangan membuat berbagai alasan," katanya.

Dia menambahkan, DPR selama ini selalu disudutkan oleh masyarakat karena kinerjanya buruk, padahal DPR tidak bisa menjalankan fungsinya apabila tidak ada koordinasi dengan pemerintah. (Sugeng Irianto), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR Apresiasi Laporan Pendahuluan RAPBN 2015

Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka dari Fraksi PDIP mengapresiasi Laporan Pendahuluan Pemerintah atas Kerangka Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2015, Dimana dalam laporannya pemerintah berjanji untuk membuka lapangan kerja.

"DPR menyambut baik itikad pemerintah untuk membuka lapangan kerja di dalam laporannya," ujarnya di depan Sidang Paripurna DPR, Selasa (20/5).



Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka.

Namun baru-baru ini, lanjutnya, terdapat 4900 buruh rokok yang telah melakukan PHK karyawannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah agresif untuk melindungi industri nasional kita.

"Kami juga mengingatkan kepada Timwas DPR yang berangkat ke Arab Saudi, disinyalir adanya indikasi dari oknum pemerintah, bahwa kunjungan tersebut akan diarahkan untuk mengakhiri moratorium TKI," ujarnya.



Menyinggung soal pembahasan RUU Keuangan Negara, anggota DPR (F-PKS) Iskan Qolba lubis mendesak kepada Pimpinan Dewan untuk menegur Menteri Keuangan M. Chatib Basri.

Pasalnya, sudah lima kali pembahasan RUU tersebut belum sekalipun Menkeu hadir menghadiri pembahasan legislasi tersebut. “Kita minta Menkeu ditegur supaya diboikot agar tidak

datang ke Banggar, ataupun Komisi XI DPR,” tegasnya. (Sugeng Irianto), foto : [naefurodjie/parle/hr.](#)

Kedisiplinan Boleh Tapi Tanpa Kekerasan

Terkait meninggalnya taruna STIP akibat dipukul oleh seniornya belum lama ini, Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, kejadian tersebut merupakan kejadian luar biasa dan kita harapkan tidak terjadi lagi ke depannya.

“Kunjungan kita ke STIP Jakarta, dalam rangka tindak lanjut pengawasan yang telah menimbulkan korban jiwa dan kita ingin lihat proses pendidikan yang berlangsung di sekolah tersebut,” ujar Lasarus Saat meninjau Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, Senin Sore, (19/5).

Menurutnya, Kunjungan kerja spesifik ini juga bertujuan ingin melihat kelemahan apa yang ada di sekolah



Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus.

tersebut. Selain itu, hal apa saja yang bisa dilakukan perbaikan oleh DPR ke depannya.

“Kedisiplinan boleh saja, tetapi jangan sampai ada kekerasan di sekolah STIP, karena itu kita ingin para taruna dan civitas akademisi memiliki pemahaman yang sama,” terangnya.

Dia menambahkan, jika memang masih terulang tindak kekerasan terhadap taruna STIP tentunya tidak ada jalan lain kita akan mengusulkan menutup sekolah tersebut. “Nanti kita akan panggil Kementerian Perhubungan, setelah Kunjungan ini,” katanya. (Sugeng Irianto), foto : [andri/parle/hr.](#)

Tiket KA Mudik Langka, DPR Segera Panggil PT KAI



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said mengatakan, Komisi V DPR akan melakukan fungsi pengawasan terkait

habisnya tiket KA mudik *via online*. Pasalnya, banyak yang menduga ini akibat permainan mafia calo tiket.

“Kita akan melakukan fungsi kontrol artinya jangan sampai dimanfaatkan oleh calo, padahal ini sudah prosedur ketika membeli tiket harus dengan kartu pengenal,” ujarnya menanggapi kelangkaan tiket KA menjelang lebaran ini kepada Parlemen, baru-baru ini.

Menurutnya, saat ini memang ada peningkatan pengguna kereta api untuk mudik sebesar 10 persen. “Orang mulai senang menggunakan kereta api disamping lebih nyaman dan aman,” katanya.

Dia menambahkan, Komisi V DPR akan terus mendorong perbaikan

infrastruktur kereta api ke depannya. “Ini semua sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Sementara anggota Komisi V DPR Saleh Husin menyayangkan kelangkaan tiket kereta api untuk keperluan mudik. Dua bulan jelang lebaran, tiket kereta api dari Jakarta ke berbagai daerah di Jawa sudah ludes.

Menurut Saleh, pihaknya akan memanggil Kementerian Perhubungan dan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait persiapan mudik lebaran 2014. “Kelangkaan tiket kereta api untuk lebaran akan kita pertanyakan ke pemerintah. DPR minta pemerintah memastikan persiapan mudik lebaran bisa lebih baik daripada tahun lalu,” katanya. (Sugeng Irianto), foto : [naefurodjie/parle/hr.](#)

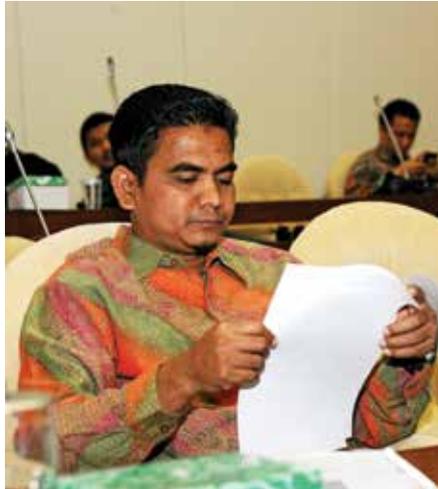
Kasus Century Terlalu Lama dan Meletihkan, Perlu Percepatan

Anggota Timwas Century DPR Indra mengatakan, dengan pemanggilan Wapres Boediono, mantan Menkeu Sri Mulyani dan mantan Wapres Jusuf Kalla dalam saksi persidangan di KPK belum lama ini justru menjadi bahan-bahan tambahan bagi Timwas Century DPR. Ada hal baru yang disampaikan Boediono adalah terkait penegasan dana talangan kepada Bank Century dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun, adalah tanggungjawab LPS.

“Keterangan itu kata Indra, mempertegas keterangan Boediono ketika diperiksa KPK di kediamannya 4 bulan lalu, yang bertanggungjawab adalah LPS. Dalam kesaksian di KPK juga mengesankan tanggungjawab kepada LPS,” katanya.

Meski demikian, dia menilai, dalam persidangan KPK yang lalu JPU dalam menggali keterangan Boediono kurang optimal dan tidak dalam. Karena itu menjadi penting bagi Timwas untuk mengawasi KPK supaya lebih serius dan optimal, dan dalam waktu dekat diagendakan rapat dengan KPK.

Selain itu, lanjut Indra, dengan



Anggota Timwas Century DPR Indra.

kesaksian Boediono di KPK semakin banyak hal terkonfirmasi. “Kita dorong KPK, jangan menunggu Budi Mulya mendapatkan keputusan tetap (inkrah), baru yang lain diperiksa. Seharusnya paralel, apalagi yang ditunggu, toh keterangan Sri Mulyani, Boediono dan JK banyak dikonfirmasi banyak hal. Negara ini terlalu lama letih mengawal kasus Century yang hampir empat tahun, sehingga perlu percepatan,” tandas Politisi PKS ini.

Saat dikonfirmasi bahwa KPK pernah menyebutkan tersangka kasus Century Budi Mulya dan kawan-kawan, Indra mengatakan yang ditunggu siapa “dan kawan-kawan” ini segera diumumkan. Salah satu Deputy BI SCF memang sedang sakit, tetapi yang lain semakin terkonfirmasi. Kesimpulan Timwas sebangun dan sejalan dengan persidangan KPK sehingga “dan kawan-kawan” ini perlu segera diangkat secara paralel.

“Kalau menunggu Budi Mulya inkrah sampai ke MA waktunya bisa setahun, lelah kita. Karena itu Timwas mendesak segera diparalelkan, sehingga Timwas selesai kasus Century semakin jelas,” katanya.

Ditambahkan Indra, Timwas masih tetap berkemungkinan memanggil Boediono yang hingga kini belum dianulir. Soal pemanggilan KPK sudah jelas diagendakan pada persidangan sekarang ini. Yang juga akan dipertanyakan adalah masalah aset, sebab kasihan nasabah Bank Century yang hingga kini asetnya belum dibayarkan “Saya kira perlu di *up-date* ulang,” tutur Indra. (mp), foto : eka hindra/parle/hr.

Pemerintah Perlu Respon Pembangunan Rambu Suar Malaysia di Tanjung Datu

Anggota DPR RI Sukiman meminta Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti dan menyelidiki terkait pembangunan rambu suar oleh Malaysia di Kawasan Perairan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. “Pemerintah harus serius menyingkapi ini karena menyangkut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya kepada Parle Senin (19/5) di Jakarta.

Menurut Sukiman, pembangunan rambu suar ini juga melibatkan pengawalan dari militer kerajaan Malaysia.



Anggota DPR RI Sukiman.

“Informasi yang saya terima cukup valid, setelah berkomunikasi dengan Pangdam dan pihak Angkatan Laut serta masyarakat perbatasan,” ungkap politisi dari Fraksi PAN.

Sesuai pantauan radar, kegiatan mereka meliputi posisi koordinat 02-05-053 Utara, 109-38-760 Timur.

Lebih lanjut Sukiman meminta pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung di perbatasan dengan Negara Malaysia khususnya di Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

“Perlu pembangunan sarana pangkalan TNI Angkatan Laut termasuk perlengkapan telekomunikasi canggih,

supaya di wilayah daerah perbatasan yang rentan TNI AL dapat bereaksi dengan cepat. Selain itu perlu adanya kapal patroli cepat TNI AL di daerah perbatasan yang mampu digunakan untuk memonitor wilayah perairan perbatasan di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” tandas Sukiman. (as), foto : neafurodjie/parle/hr.

DPR Siap Jadi Percontohan Gedung Hemat Energi

Penghematan energi harus digalakkan secepat mungkin. Hemat energi bukan sebatas hanya kebiasaan sesaat, namun harus menjadi budaya. Peralannya, jika tidak menghemat energi, salah satunya listrik, tak lama lagi Indonesia bisa mengimpor listrik dari negara tetangga.

“Kami tidak keberatan menjadi percontohan untuk bangunan hemat energi bagi instansi lain. Dimulai dari Gedung Sekretariat Jenderal DPR ini, kita mulai penghematan energi, dengan memonitoring penggunaan listrik. Mudah-mudahan jika efisiensi ini bisa menyentuh angka 50%, bisa kita ajak instansi lain,” ujar Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, ketika menerima sejumlah guru besar Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, Rabu (21/05).

Win, sapaan akrab Winantuningtyastiti menambahkan, pihaknya sudah menghimbau kepada seluruh staf dan pegawai Setjen DPR untuk melakukan penghematan listrik. Terlepas dari staf atau pegawai DPR, sebagai warga negara yang baik, diharapkan dapat menghemat listrik, sehingga diharapkan jangan sampai mengimpor listrik.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti saat diwawancara wartawan.

“Satu atau dua tahun yang lalu kami membuat edaran tentang hemat energi, konteksnya efisiensi, dalam rangka membudayakan untuk hemat energi. Sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI, saya mengajak seluruh staf dan pegawai Setjen DPR untuk berkontribusi penghematan energi,” tambah Win.

Win mengaku tertarik dengan saran yang ditawarkan Tim Teknik Fisika ITB. Dalam paparannya, ditawarkan alat untuk memonitoring penggunaan listrik di gedung-gedung Setjen DPR. Sehingga, dengan adanya monitoring, dapat diketahui wilayah gedung yang mengkonsumsi listrik terbanyak atau

pun paling sedikit.

“Sangat mungkin memasang alat hemat energi itu, namun dilakukan secara bertahap, karena ada biaya yang harus dikeluarkan juga. Setidaknya ada alat sensor untuk menghemat listrik. Ditambah, tim ITB ini ada yang mengetahui struktur bangunan DPR ini, maka kita rencanakan akan bekerjasama dengan tim ITB ini,” imbuh Win.

Ia berharap, dengan adanya alat monitoring listrik ini, dapat mengurangi penggunaan listrik, sekaligus menekan anggaran untuk konsumsi listrik. (sf) foto : eka hindra/parle/hr.



DPR Siap Jadi Tuan Rumah Sidang *Standing Committee* APA



Ketua BKSAP DPR RI Surahman Hidayat.

DPR RI memastikan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah dalam pertemuan *Standing Committee on Economic Development* dan *Sustainable Development*, yang merupakan bagian dari *Asian Parliamentary Assembly (APA)*. Pertemuan ini akan berlangsung pada 2-5 Juni 2014 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Surahman Hidayat.

“DPR RI telah menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah dalam pertemuan *Standing Committee on Economic Development* dan *Sustainable Development*, bagian dari *Asian Parliamentary Assembly*. Masing-masing *standing committee* mengadakan pertemuan sebelum sidang umum. Indonesia menjadwalkan pertemuan ini pada tanggal 2 -5 Juni besok,” jelas Surahman di sela-sela acara diskusi pakar persiapan penyelenggaraan sidang APA, di ruang rapat BKSAP, Gedung Nusantara III, Senin (19/04).

Politisi PKS ini menambahkan, sampai saat ini baru 10 negara melakukan konfirmasi kehadiran, dari 41 negara anggota dan 17 observer. “Undangan sudah disebar dan sudah dimintakan konfirmasi. Sampai sekarang, sudah 10 negara anggota *confirm* dari minimum 7 anggota,” imbuh Surahman.

Diskusi dengan pakar ini untuk memantapkan bahan sidang yang akan dibahas pada *Standing Committee*. Diharapkan, masukan dari pakar ini dapat memperkuat resolusi yang akan disampaikan pada pertemuan.

“Supaya bobot resolusi-resolusi kuat, maka DPR RI mengambil inisiatif mengakses para pakar. Setelah bahan-bahan dari pakar diserap Anggota DPR dan tenaga ahli nanti kita akan konsinyering selama 1 hari untuk memantapkan *draft*. Setelah *draft* siap, tentu disirkulasi ke calon peserta, barangkali ada tambahan-tambahan.

Tentu supaya *draft* resolusi *Standing Committee on Economic Development* yang diketuai Indonesia ini hasilnya kuat,” jelas Surahman.

Selain resolusi-resolusi yang sedang dipersiapkan ini, Parlemen Indonesia juga akan membawa beberapa isu, baik lingkup ASEAN, maupun internasional.

“Isu itu tentu akan dikaitkan dengan perodesasi pemerintahan. Pada 2015 itu ada dua even penting. Pertama MDGS, itu internasional. Yg kedua, soal *economy Asean community*, khususnya di bidang ekonomi. Itu kita padukan dengan resolusi-resolusi terkait,” jelas Surahman.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Toferry P Soetikno menjelaskan bahwa pembahasan APA ini sangat relevan dengan pembahasan tingkat global saat ini.

“Tema pertemuan APA yang mendatang itu memang sangat relevan dengan pembahasan tingkat global saat ini, agenda pemberantasan kemiskinan, agenda pembangunan berkelanjutan. Memang hal-hal yang sekarang menjadi topik pembahasan pada tingkat global. Pembahasan ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan pihak pemerintah pada tingkat global,” jelas Toferry usai pertemuan.

Ia menambahkan, pada 2015 agenda pembangunan global akan diperbaharui. Termasuk agenda terkait pembangunan berkelanjutan.

“Setelah 2015 agenda pembangunan global akan diperbaharui. Dan itu tidak hanya terkait pengentasan kemiskinan, tapi juga agenda-agenda terkait pembangunan berkelanjutan yang memfokuskan pada aspek pembangunan yang seimbang mengenai ekonomi, perlindungan lingkungan dan pembangunan berdimensi sosial,” jelas Toferry. (sf) foto: eka hindra/parle/hr.



Ketua DPR RI Marzuki Ali menerima kunjungan kehormatan Dubes Republik Pakistan untuk Indonesia Ms. Attia Mahmood, Kamis (22/5) Foto: Naefurojje/Parle/Hr.



Dialog Semangat Pagi TV Parlemen bersama Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani, Senin (19/5) Foto: Andry/Parle/Hr.



Rapat Kerja Pansus RUU MD3 dipimpin Wakil Ketua Ahmad Yani dengan Kapolri, PPATK, KPK, dan BPK. Senin (19/5) Foto: Naefurodjie/Parle/HR.



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung membuka Simulasi Rapat Kerja DPR RI peserta Parlemen Remaja di Operation Room Gedung Nusantara, Selasa (20/5) Foto: Andry/Parle/Hr.

